

STUDI EVALUASI PENANGANAN ABRASI DI KAWASAN PESISIR KOTA LHOKEUMAWE

Oleh :

LUCY YULIANTI

ABSTRAK

Kawasan pesisir Kota Lhokseumawe dalam perkembangannya telah mengalami penurunan kualitas lingkungan. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa kegiatan pembangunan yang tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan pesisir Lhokseumawe antara lain sedimentasi, erosi, abrasi, dan sebagainya. Abrasi menjadi permasalahan yang paling serius, bahkan telah dikategorikan sebagai suatu bencana.

Abrasi yang terjadi di pesisir Lhokseumawe selain dipengaruhi oleh faktor oseanografi Selat Malaka, juga dipengaruhi oleh faktor kegiatan manusia, antara lain alih fungsi hutan bakau, penambangan pasir pantai tanpa batas, pelanggaran sempadan pantai dan reklamasi pantai. Abrasi ini telah memberikan kerugian materi yang tidak sedikit. Abrasi juga berdampak pada berbagai aspek, seperti fisik lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan ekologi.

Sejauh ini pembangunan tanggul dan pemecah ombak (*breakwater*) merupakan satu-satunya cara yang diambil oleh Pemerintah Kota dalam mengurangi dampak abrasi. Berkembang wacana bahwa untuk menanggulangi abrasi ini tidak cukup hanya dengan penanganan secara fisik saja, tetapi diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Pengelolaan Pesisir Lhokseumawe saat ini cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penanganan abrasi di Kota Lhokseumawe. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan fenomena yang berkaitan erat dengan permasalahan abrasi, penanganan abrasi, dan pengelolaan kawasan pesisir Kota Lhokseumawe. Pada akhirnya diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan penanganan abrasi di Kota Lhokseumawe berdasarkan hasil temuan penelitian ini.

Untuk menganalisis evaluasi penanganan abrasi, ditetapkan kriteria-kriteria berikut ini, yaitu (1) pembangunan *revetment*, (2) pembangunan *groin*, (3) pembangunan *seawall*, (4) pembangunan pemecah ombak sejajar pantai, (5) penertiban garis sempadan pantai, (6) relokasi permukiman penduduk, (7) pelarangan penambangan pasir, dan (8) penanaman kembali hutan bakau. Dalam menentukan penilaian terhadap evaluasi penanganan abrasi yang telah dilakukan, digunakan metode

Sturgess. Dengan mengetahui jumlah kelas interval sebanyak 4 (empat), maka kelas interval tersebut dibagi kedalam kelompok penilaian yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik.

Dari hasil analisis diketahui bahwa secara keseluruhan upaya-upaya penanganan abrasi yang sudah dilakukan tersebut menunjukkan hasil **Kurang Baik**. Penanganan abrasi yang selama ini dilakukan cenderung bersifat parsial dan kurang terkoordinasi.

Untuk menanggulangi abrasi ini tidak cukup hanya dengan penanganan secara fisik saja, tetapi diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Penanganan abrasi yang berorientasi pada komponen-komponen pembangunan di wilayah pesisir diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan di kawasan pesisir. Komponen pembangunan wilayah pesisir merupakan model operasional pembangunan wilayah pesisir secara terpadu.

Kata kunci: abrasi, pesisir

ABSTRACT

In its development, Lhokseumawe's coastal area has suffered from environmental degradation. This decrease is caused by some construction activity which does not consider the geographical conditions and environmental conservation principles. Environmental degradation in Lhokseumawe's coastal areas include sedimentation, erosion, abrasion, and so forth. Abrasion becomes the most serious problem which has been categorized as a disaster.

Abrasion that occurs in Lhokseumawe coastal area is influenced by oceanography factors of Malacca Strait and human activities such as the conversion of mangrove forests, uncontrolled coastal sand mining, violation of shoreline and coastal reclamation. Abrasion has contributed for a number of material loss. Abrasion also impacts on some other various aspects, such as physical environment, economic, social, cultural, and ecological.

So far the construction of levees and breakwater are the only ways taken by the local government to reduce the abrasion impact. There is a discourse that to overcome this abrasion physical treatment alone is not enough. It requires a more integrated and comprehensive management. Lhokseumawe coastal management today tend to be sectoral, thus the policies made are often overlapping one to another.

The purpose of this study is to evaluate the handling of abrasion in Lhokseumawe coastal areas. This study uses a qualitative approach to describe the phenomenon that is related to the problems of abrasion, abrasion treatment, and management of Lhokseumawe's coastal area. In the end, the research is expected to provide inputs in formulating policies to handle abrasion in Lhokseumawe's coastal area based on the results of this research.

To analyze the evaluation of the abrasion management, the following criteria are set: (1) construction of revetment, (2) construction of groins, (3) construction of seawall, (4) construction of breakwater, (5) control of the shoreline, (6) relocation of settlements, (7) ban on sand mining, and (8) rehabilitation of mangrove forests. In determining the rating of the evaluation of abrasion treatment, Sturgess method is used. By knowing 4 (four) classes interval, then the interval classes are divided into groups of assessment that is good, quite good, bad, and worst.

The analysis results show that the overall abrasion treatment has bad results. Abrasion treatment tend to be partial and less coordinated. To overcome this abrasio, physical handle is not enough, yet it requires a more integrated management and comprehensive. The abrasion reduction that is oriented to component of development in coastal areas is expected to solve various problems in coastal areas. Coastal development component is the operational model of integrated coastal development.

Keywords: *abrasion, coastal area*